

Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun

Nur Hidayah Hasibuan¹ Julia Ivanna² Windawati Pinem³ Prayetno⁴ Yakobus Ndona⁵

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: nurhidayahhasibuan2503@gmail.com¹ juliaivanna@unimed.ac.id²

windawatipinem@unimed.ac.id³ prayetno@unimed.ac.id⁴ yakobusndona@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program ketahanan pangan di Desa Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Program ketahanan pangan merupakan salah satu upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ketersediaan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan peternakan sapi yang dikelola oleh pemerintah desa bekerja sama dengan BUMNag dan masyarakat sebagai penerima bantuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan di Desa Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari kepala desa, pengurus BUMNag, serta masyarakat yang menjadi peserta program. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ketahanan pangan di Desa Bangun telah dilaksanakan melalui kegiatan peternakan sapi yang didukung oleh kebijakan pemerintah desa serta alokasi dana desa. Namun pelaksanaan program tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat beberapa kendala, seperti, sumber daya alam, kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya pakan ternak, rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi, serta kurangnya pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat penerima bantuan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Ketahanan Pangan

Abstract

This study aims to determine the implementation of the food security program in Bangun Village, Gunung Malela District, Simalungun Regency, and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. The food security program is one of the village government's efforts to improve food availability and community welfare through the development of cattle farming managed by the village government in collaboration with the State-Owned Enterprises (BUMNag) and the community as aid recipients. This study used qualitative research methods with a descriptive approach. The study was conducted in Bangun Village, Gunung Malela District, Simalungun Regency. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation with informants consisting of the village head, BUMNag administrators, and community members who participated in the program. The research analysis used George C. Edwards III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that the implementation of the food security program in Bangun Village has been carried out through cattle farming activities supported by village government policies and village fund allocations. However, the program's implementation has not been optimal due to several obstacles, such as natural resources, lack of program socialization to the community, limited animal feed resources, low community interest in participating, and lack of supervision and guidance for aid recipients.

Keywords: Implementation, Policy, Food Security



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Implementasi merupakan tahap krusial yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam menyelesaikan persoalan publik. Suatu program harus diimplementasikan agar menghasilkan dampak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Kasmad, 2023). Dengan pernyataan itu, implementasi merupakan alat penting dalam mewujudkan rencana dan menyelesaikan permasalahan baik pada tingkat nasional maupun organisasi. Ketahanan pangan merupakan wujud kedaulatan dan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Tujuan utama ketahanan pangan adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara adil dan berkelanjutan, serta tidak bertentangan dengan nilai agama dan norma sosial yang berlaku. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan, yang ditandai dengan tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau (Rahmi dan Jumiati 2020). Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup kemudahan akses dan pemanfaatan pangan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketersediaan pangan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti jumlah dan kualitas pangan yang stabil, harga yang terjangkau, serta daya simpan pangan yang memadai. Indikator-indikator tersebut penting untuk mendukung kehidupan masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif sesuai dengan budaya setempat. Oleh karena itu, penyediaan pangan hingga ke wilayah terkecil, khususnya desa sebagai pusat kegiatan pertanian, menjadi langkah awal dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Upaya ini dilakukan dengan mengintegrasikan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan (Darmoatmodjo dan Ferichani 2024). Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Pangan, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Peraturan ini mengatur peran pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan ketahanan pangan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan harus dilakukan secara terpadu dan berbasis wilayah. Dalam hal ini, pembangunan pedesaan memiliki peran yang sangat penting karena desa berkontribusi besar dalam penyediaan bahan pangan, tenaga kerja pertanian, serta distribusi pangan bagi masyarakat.

Dalam konteks pembangunan desa, pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui undang-undang ini, desa diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya dan anggaran pembangunan, termasuk untuk mendukung program ketahanan pangan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, desa ditempatkan sebagai pelaku utama dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat. Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Peraturan ini mewajibkan desa mengalokasikan minimal 20 % Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Ketentuan ini bertujuan agar program ketahanan pangan tidak hanya bersifat kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar dilaksanakan melalui dukungan anggaran di tingkat desa. Program ketahanan pangan di desa diharapkan dapat memberikan akses bagi masyarakat terhadap modal, sarana dan prasarana, kelembagaan, sumber daya manusia, serta pemanfaatan sumber daya alam. Program ini bertujuan untuk mendorong kemandirian pangan rumah tangga dan

masyarakat, sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat prasejahtera di pedesaan dalam mengelola potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga peran negara tetap menjadi faktor utama dalam menjamin ketahanan pangan nasional (Sunarso, dkk 2023).

Kegiatan ketahanan pangan terbagi dalam beberapa subsektor, diantaranya ada peternakan dan/perikanan. Dalam hal ini, dana desa harus dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pengembangan komoditas pangan guna menciptakan kesejahteraan dan pemberdayaan di desa. Dana desa untuk percepatan produksi pangan harus dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan agar masyarakat desa memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan di desa. Desa Bangun yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun. Adapun jumlah desa di Kecamatan Gunung Malela terdapat 16 Nagori/kelurahan. Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa Pemerintahan Desa Bangun telah mengimplementasikan program ketahanan pangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa. Masyarakat Desa Bangun sebagian besar bermata pencaharian di bidang peternakan, sehingga program ketahanan pangan di desa ini diarahkan untuk mendukung sektor tersebut. Implementasinya dilakukan melalui pemberian bantuan berupa indukan sapi kepada masyarakat, dengan tujuan memperkuat sumber penghidupan utama warga. Saat ini, pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Bangun dikelola oleh BUMNagori Bangun Rezeki. Sebelumnya, BUMNagori ini lebih berfokus pada usaha penyewaan peralatan pesta dan jasa perencanaan pernikahan, namun kini perannya bergeser untuk mendukung pengembangan ketahanan pangan melalui sektor peternakan.

Dalam perencanaan dan evaluasi tahun sebelumnya, peternakan sapi dipilih sebagai sektor yang berpotensi menjadi program unggulan BUMNagori ke depan. Hal ini karena sebagian besar masyarakat Nagori Bangun bekerja sebagai peternak sapi, namun cara perawatannya masih tradisional sehingga perkembangan usaha ternak tidak terlalu maju. Selain itu, permintaan daging sapi pada hari-hari besar seperti Idul Adha sering kali tidak terpenuhi. Melihat kondisi tersebut, pemerintah desa kemudian melakukan evaluasi dan mempertimbangkan bahwa pengembangan peternakan sapi perlu menjadi program prioritas. Namun, dalam perencanaan dan evaluasi kerja tahun sebelumnya, peternakan sapi diidentifikasi sebagai sektor potensial yang akan menjadi program unggulan BUMNagori di masa mendatang. Potensi ini muncul karena mayoritas masyarakat Nagori Bangun banyak yang bekerja sebagai peternak sapi dan masih melakukan perawatan secara tradisional yang membuat tidak ada perkembangan. melihat juga permintaan daging sapi pada saat hari besar seperti idul adha kurang maka dari itu pemerintah desa melakukan evaluasi. Program ini sejalan dengan Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati yang dibiayai Dana Desa untuk meningkatkan ketersediaan daging dan perekonomian masyarakat. Peluang usaha semakin besar karena kebutuhan daging yang terus meningkat. Dengan dukungan sumber daya dan pengalaman, peternakan sapi dipandang menjanjikan sebagai pilar ekonomi desa, sehingga program ini disepakati melalui musyawarah.

Berdasarkan penyusunan Program Ketahanan Pangan di Desa Bangun, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, peneliti memfokuskan perhatian pada satu program utama, yaitu program pengembangbiakan sapi sebagai bagian dari ketahanan pangan hewani dan nabati. Program ini memiliki beberapa tahapan, dimulai dari penyusunan rencana kerja. Dalam rencana kerja tersebut dijelaskan pihak-pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang digunakan, nilai investasi, bentuk kerja sama, proyeksi keuangan, serta pembagian keuntungan usaha. Dalam kemitraan pengembangbiakan sapi ini, BUM Desa berperan

menyediakan bibit sapi dan bahan pendukung lainnya. Sementara itu, masyarakat menyediakan kandang serta melakukan perawatan harian terhadap ternak. Kedua pihak memiliki hak yang sama, yakni memperoleh keuntungan dari usaha penggemukan sapi melalui sistem bagi hasil yang telah disepakati bersama. Sapi yang digunakan dalam program ini berada di Nagori Bangun, dengan status hukum dan kepemilikannya berada di bawah BUM Desa. Sumber daya ternak tersebut kemudian dimanfaatkan dalam kerja sama penggemukan sapi antara BUM Desa dan masyarakat melalui mekanisme bagi hasil.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan, dalam implementasi program pengembangbiakan sapi yang dijalankan oleh BUM Nagori Bangun sebagai bentuk pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Program ketahanan pangan desa ini dibentuk untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan penduduk, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui kegiatan pemberdayaan berbasis potensi lokal. Melalui program pengembangbiakan sapi ini, pemerintah desa berharap dapat menyediakan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat melalui sistem bagi hasil, sekaligus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan peternakan. Program ini juga diharapkan dapat mengubah pola peternakan tradisional menjadi lebih modern, terstandar, dan berkelanjutan, serta pada akhirnya menjadi unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Nagori (BUMNagori), sehingga memperkuat ketahanan ekonomi desa dalam jangka panjang.

Namun, kenyataannya pelaksanaannya di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua harapan tersebut berjalan mulus. Berdasarkan wawancara pra penelitian, program yang telah berjalan hampir tiga tahun ini menghadapi berbagai tantangan. Meskipun pemerintah desa telah membuat prosedur seperti penyusunan anggaran (RAB), pembuatan perjanjian kerja sama, dan pemberian pelatihan awal, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala. Program pengembangbiakan sapi ini telah berjalan tiga kali putaran sejak dimulai pada tahun 2023, tepat setelah masa pemulihan pascapandemi COVID-19. Program ini sudah berjalan sebanyak 3 kali putaran. Dalam hal pelaksanaan program, hasil setiap putaran bervariasi. Pada putaran pertama mendistribusikan 9 ekor sapi, tetapi hanya 6 ekor yang berhasil, pada putaran kedua mendistribusikan sekitar 20-22 ekor sapi, tetapi masih terdapat kematian sapi dan tahap ketiga berkurang menjadi 11-12 ekor sapi karena pemotongan anggaran dan kurangnya minat dari peternak. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah kurangnya keseriusan sebagian penggaduh/pengelola dalam memelihara sapi. Ketidakkonsistenan dalam pemberian pakan dan perawatan membuat perkembangan sapi tidak maksimal, bahkan beberapa sapi mengalami penurunan berat badan. Kondisi pemeliharaan yang kurang optimal ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kematian sapi, baik anak maupun induk, yang secara langsung menghambat keberhasilan program.

Selain itu, keterbatasan pakan hijauan menjadi persoalan tersendiri. Ketersediaan rumput di desa cukup terbatas karena banyak masyarakat lain yang juga beternak, sehingga penggaduh harus bersaing mencari pakan setiap hari. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan sapi, tetapi juga menurunkan minat masyarakat untuk terlibat dalam program. Banyak warga merasa bahwa pemeliharaan sapi memerlukan tenaga dan waktu yang besar, sementara risiko kerugiannya tidak kecil. Di sisi lain, pelaksanaan program juga dipengaruhi oleh faktor anggaran. Dana ketahanan pangan mengalami pengurangan karena harus dibagi dengan program desa lainnya, sehingga jumlah sapi yang dapat disalurkan pada tahap berikutnya menurun. Sementara itu, pelatihan teknis hanya diberikan satu kali pada awal program karena mengingat anggaran juga tidak cukup untuk melakukan pelatihan yang berkelanjutan. Ketidakadaan pelatihan lanjutan membuat penggaduh tidak memiliki pendampingan ketika menghadapi persoalan baru, baik terkait kesehatan ternak, pakan,

maupun manajemen kandang. Pengawasan terhadap pelaksanaan program juga belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat perjanjian dan sanksi bagi penggaduh yang lalai, mekanisme kontrol di lapangan belum dilakukan secara teratur. Akibatnya, berbagai persoalan seperti penurunan kesehatan sapi atau lambatnya pertambahan bobot baru diketahui setelah kondisinya cukup serius.

Meskipun demikian, program ini tetap menghasilkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) desa dan peningkatan pemahaman tentang praktik peternakan sapi yang lebih baik di antara sebagian warga walaupun belum optimal atau sesuai harapan pemerintah sebelumnya. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan program dan kenyataan implementasinya. Di satu sisi, program memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan pendapatan dan pengetahuan masyarakat. Namun, di sisi lain, berbagai kendala teknis, anggaran, dan sumber daya manusia menghambat hasil program yang optimal. Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi program ketahanan pangan ini penting karena program ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan pendapatan warga, memperkuat ketahanan ekonomi desa, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Namun, temuan awal menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan program dan kenyataan implementasinya di lapangan. Beberapa kendala seperti kurangnya keseriusan peternak, kematian ternak, keterbatasan pakan, rendahnya minat masyarakat, dan pemotongan anggaran berdampak langsung pada efektivitas program. Hal ini menuntut penelitian untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala program.

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran sejauh mana pelatihan, pendampingan, dan mekanisme perjanjian yang diterapkan pemerintah desa benar-benar membantu meningkatkan kapasitas masyarakat. Tanpa evaluasi yang menyeluruh, desa berpotensi mengulang kesalahan yang sama atau tidak mampu mengoptimalkan potensi ekonomi yang seharusnya diperoleh dari program ini. Penelitian ini juga memiliki nilai praktis bagi pemerintah desa karena hasilnya dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan baik untuk melanjutkan program, mengubah skema menjadi penggemukan kolektif, menyerahkan pengelolaan ke BUMDes/BUMNagori, maupun memperbaiki sistem pengawasan dan pembinaan. Bagi desa yang lain, penelitian ini dapat menjadi model atau pembelajaran tentang bagaimana program ketahanan pangan harus dirancang dan dikelola agar memberikan manfaat maksimal. Selain itu, program ketahanan pangan ini tidak hanya berfokus pada usaha peternakan, tetapi juga berhubungan dengan bagaimana masyarakat dilibatkan dan diberdayakan dalam pembangunan desa. Program ini mengajarkan pentingnya kerja sama, gotong royong, tanggung jawab, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan kebijakan yang dibuat pemerintah desa. Melalui kegiatan penggemukan sapi, masyarakat diberi kesempatan untuk ikut berperan, memperoleh manfaat ekonomi, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha. Dengan demikian, penelitian ini penting karena tidak hanya menilai pelaksanaan program pengembangbiakan sapi, tetapi juga melihat bagaimana program ini mampu memberdayakan warga, mendorong partisipasi masyarakat, dan memperkuat kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana "Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik populasi tertentu, atau bidang tertentu, secara sistematis dan faktual, akurat dan

terkini. Metode ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang implementasi program ketahanan pangan di Desa Bangun, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, dengan penekanan pada empat faktor implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Ketahanan Pangan

Implementasi program ketahanan pangan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat serta memperkuat kemandirian pangan desa. Program ini umumnya dilakukan melalui pemanfaatan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, maupun peternakan untuk meningkatkan produksi pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, implementasi program ketahanan pangan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Menurut George C. Edwards III, komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Apabila komunikasi berjalan dengan baik maka tujuan kebijakan akan lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, proses transmisi informasi mengenai program ketahanan pangan hewani dilakukan melalui beberapa tahapan. Informasi program pertama kali disampaikan melalui musyawarah Nagori yang melibatkan pemerintah desa dan BPD, kemudian informasi tersebut diteruskan kepada masyarakat melalui kepala dusun masing-masing. Selain itu, informasi program juga diumumkan melalui media sosial desa serta dijelaskan secara langsung kepada masyarakat yang menjadi calon penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan upaya penyampaian informasi melalui beberapa saluran komunikasi agar masyarakat mengetahui adanya program ketahanan pangan tersebut.

Dari sisi komunikasi, Bapak MA menjelaskan bahwa program sudah disosialisasikan melalui berbagai jalur seperti musyawarah Nagori, BPD, media sosial desa, dan kepala dusun. Bahkan beliau menegaskan bahwa informasi sudah konsisten walaupun ada perubahan kebijakan seperti masa kontrak yang berubah dari 3 tahun menjadi 2 tahun serta pengalihan pengelolaan ke BUMNag. Hal ini juga diperkuat oleh Bapak ZF yang menyatakan bahwa sebelum program berjalan selalu dilakukan musyawarah dan penjelasan teknis kepada penerima bantuan. Namun kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Bapak FSPE menyampaikan bahwa "kalau ada perubahan mereka lamban kasih tahu, tiba-tiba saja sudah berubah," kemudian Bapak MC mengatakan bahwa "informasi kadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan," dan Bapak MRF juga menegaskan bahwa informasi sering terlambat dan berubah tiba-tiba. Artinya, komunikasi memang dilakukan, tetapi hanya berhenti pada tahap awal sebagai sosialisasi, bukan sebagai proses yang berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan penelitian Sari (2020) dalam studi implementasi program ketahanan pangan berbasis partisipatif, disebutkan bahwa komunikasi yang efektif bukan hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga harus melibatkan interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dalam penelitian tersebut, setiap informasi yang disampaikan selalu diikuti dengan ruang diskusi, sehingga masyarakat tidak hanya menerima, tetapi juga dapat memberikan respon, masukan, bahkan menyampaikan kendala secara langsung. Selain itu, komunikasi juga

dilakukan secara rutin melalui evaluasi bulanan dan pendampingan lapangan, sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti.

Lebih jauh lagi, dalam penelitian Sari (2020), komunikasi tidak berhenti pada tahap sosialisasi awal, tetapi terus berlanjut selama program berjalan. Aparat desa secara aktif turun ke lapangan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan benar-benar dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Bahkan, ketika terjadi perubahan kebijakan, informasi disampaikan secara cepat dan disertai penjelasan yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan. Dampaknya, masyarakat menjadi lebih aktif, merasa dilibatkan, dan memiliki kepercayaan terhadap program yang dijalankan. Sementara itu, kondisi di Nagori Bangun menunjukkan pola yang berbeda. Meskipun secara formal komunikasi sudah dilakukan melalui musyawarah dan sosialisasi, namun dalam praktiknya komunikasi masih cenderung satu arah dan tidak berkelanjutan. Informasi lebih banyak berhenti pada tahap awal tanpa adanya tindak lanjut yang jelas, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan atau muncul kendala di lapangan. Hal ini terlihat dari pernyataan masyarakat yang mengeluhkan keterlambatan informasi dan kurangnya respon terhadap masalah yang mereka hadapi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa komunikasi di Nagori Bangun belum berfungsi sebagai alat penggerak program, melainkan masih sebatas kewajiban administratif. Artinya, komunikasi hanya dilakukan untuk memenuhi prosedur, bukan untuk memastikan program benar-benar dipahami, dijalankan, dan berhasil di tingkat masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan program berjalan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa komunikasi di Nagori Bangun masih bersifat formalitas administratif, belum menjadi alat penggerak program, bahkan belum mampu menjembatani antara kebijakan yang dirancang dengan kondisi nyata di lapangan.

Sumber Daya

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Apabila sumber daya yang tersedia memadai, maka implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, sumber daya secara angka sebenarnya sangat kuat. Bapak MA menyebutkan bahwa dana program berasal dari Dana Desa minimal 20% setiap tahun, dengan total hampir 700 juta rupiah sejak 2022–2024. Selain itu, penerima dipilih yang sudah berpengalaman agar tidak memerlukan pelatihan tambahan. Secara administratif, kondisi ini terlihat ideal karena didukung anggaran besar dan sumber daya manusia yang dianggap siap. Namun dalam praktiknya, muncul masalah yang cukup mendasar. Bapak MSEP mengatakan bahwa “biaya pakan, kandang dan lain-lain tetap menjadi tanggung jawab kami,” lalu Bapak MC menegaskan bahwa “fasilitas dari program hanya sapi saja,” dan Bapak MRF juga menyampaikan hal yang sama. Artinya, sumber daya yang diberikan hanya fokus pada sapi, sementara faktor utama keberhasilan seperti pakan, kandang, dan biaya pemeliharaan justru tidak didukung. Ini menunjukkan bahwa secara konsep, program sudah menyediakan “inti bantuan”, tetapi mengabaikan “sistem pendukungnya”.

Masalah ini semakin diperparah oleh kondisi sumber daya alam yang tidak mendukung. Bapak MC secara jelas mengatakan bahwa “banyak masyarakat tidak berminat karena sulit mencari rumput,” dan Bapak MRF juga mengeluhkan kesulitan mendapatkan pakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan di Desa Bangun cenderung tidak memiliki ketersediaan hijauan pakan yang cukup, baik karena kondisi tanah yang kurang subur, keterbatasan lahan, maupun faktor cuaca yang tidak mendukung. Artinya, program peternakan sapi dijalankan di wilayah yang secara ekologis tidak siap mendukung keberlangsungan ternak. Di titik ini terlihat

jelas adanya ketidaksesuaian antara desain program dengan kondisi sumber daya yang ada di lapangan. Program seharusnya disesuaikan dengan potensi lokal, tetapi yang terjadi justru sebaliknya: program dipaksakan berjalan tanpa mempertimbangkan apakah lingkungan tersebut mendukung atau tidak. Akibatnya, beban pemenuhan kebutuhan pakan sepenuhnya dialihkan kepada masyarakat, yang pada akhirnya membuat program kurang diminati dan sulit berkembang. Jika dibandingkan dengan penelitian Putra (2021) tentang pengembangan peternakan berbasis sumber daya lokal, disebutkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh kesesuaian antara jenis program dengan ketersediaan sumber daya alam, khususnya pakan ternak. Dalam penelitian tersebut, sekitar 30–40% anggaran dialokasikan untuk penyediaan pakan, pelatihan pengolahan pakan, serta pengembangan hijauan. Artinya, mereka tidak hanya memberi ternak, tetapi juga memastikan ekosistem pendukungnya tersedia sebelum program dijalankan.

Hal yang sama juga diperkuat dalam penelitian Wulandari (2022) tentang implementasi program ketahanan pangan desa. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam menyesuaikan program dengan kondisi geografis dan lingkungan setempat. Di daerah yang memiliki keterbatasan pakan alami, pemerintah desa tidak memaksakan program peternakan sapi, tetapi justru mengalihkan program ke jenis usaha lain yang lebih sesuai, seperti peternakan ayam atau pengembangan tanaman pangan. Selain itu, sebagian anggaran juga digunakan untuk membangun sistem pendukung seperti kandang kolektif dan penyediaan pakan alternatif. Dampaknya, partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi karena program dianggap realistis dan sesuai dengan kondisi mereka. Sementara di penelitian ini justru sebaliknya, anggaran besar tetapi tidak menyentuh kebutuhan utama di lapangan. Bahkan tidak ada upaya untuk menyesuaikan program dengan kondisi alam yang terbatas, seperti menyediakan alternatif pakan atau mengembangkan lahan hijauan. Program tetap dijalankan dengan pola yang sama tanpa adaptasi, meskipun kondisi lingkungan jelas tidak mendukung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam aspek sumber daya bukan hanya pada keterbatasan, tetapi pada ketidaksesuaian antara program dengan kondisi sumber daya yang ada. Program tetap dijalankan di lingkungan yang tidak mendukung, tanpa adanya adaptasi kebijakan. Hal ini semakin menegaskan bahwa implementasi program ketahanan pangan di Desa Bangun masih bersifat administratif, belum berbasis pada kondisi nyata di lapangan.

Disposisi

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Apabila para pelaksana memiliki sikap yang positif serta komitmen yang kuat terhadap kebijakan, maka pelaksanaan program akan lebih mudah berjalan dan tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, Dari sisi disposisi, secara formal pelaksana terlihat memiliki komitmen yang kuat. Bapak MA menjelaskan bahwa ada aturan dan sanksi jika terjadi kelalaian, bahkan bisa sampai proses hukum. Bapak ZF juga menyatakan bahwa program dijalankan sesuai aturan dan setiap penerima telah menandatangani perjanjian. Namun jika dilihat dari pengalaman masyarakat, komitmen tersebut belum tercermin dalam tindakan nyata. Bapak FSEP mengatakan bahwa ketika sapi sakit “sudah dilaporkan tetapi tidak ada tindak lanjut,” kemudian Bapak MC menyebutkan bahwa “sering tidak ada solusi,” dan Bapak MRF juga mengatakan bahwa laporan hanya dijawab “tunggu dimusyawarahkan.” Ini menunjukkan bahwa pelaksana lebih fokus menjalankan aturan daripada menyelesaikan masalah.

Jika dibandingkan dengan penelitian Rahmawati (2019) tentang implementasi program pemberdayaan berbasis pendampingan, disebutkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komitmen pelaksana dalam merespon masalah secara cepat dan langsung di lapangan. Dalam penelitian tersebut, pelaksana tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga aktif melakukan pendampingan kepada masyarakat. Ketika muncul kendala, pelaksana langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi secara nyata dan memberikan solusi, sehingga masalah tidak berlarut-larut. Selain itu penelitian Rahmawati juga pada komitmen pelaksana terlihat dari adanya keterlibatan yang berkelanjutan, bukan hanya pada saat awal program, tetapi selama program berjalan. Pelaksana secara rutin melakukan monitoring, berkomunikasi dengan masyarakat, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaksana melakukan intervensi langsung ketika masyarakat mengalami kesulitan, tanpa harus menunggu proses formal seperti musyawarah atau rapat.

Sementara itu, kondisi di penelitian ini menunjukkan pola yang berbeda. Pelaksana cenderung bersikap pasif dan lebih banyak menunggu proses formal seperti musyawarah ketika terjadi permasalahan. Padahal, dalam situasi tertentu, masalah di lapangan membutuhkan respon yang cepat dan tindakan langsung, bukan sekadar dibahas dalam forum. Hal ini membuat banyak kendala yang dialami masyarakat tidak segera terselesaikan, sehingga berdampak pada keberlangsungan program. Selain itu, minimnya pendampingan juga menunjukkan bahwa hubungan antara pelaksana dan masyarakat belum terbangun secara kuat. Masyarakat lebih banyak berjalan sendiri dalam mengelola bantuan yang diberikan, tanpa adanya arahan atau pengawasan yang intensif dari pelaksana. Akibatnya, ketika terjadi kesulitan seperti keterbatasan pakan atau biaya pemeliharaan, masyarakat harus mencari solusi sendiri tanpa dukungan yang memadai. Perbedaan ini menunjukkan bahwa komitmen pelaksana di penelitian ini masih terbatas pada menjalankan aturan dan prosedur yang ada, belum sampai pada upaya aktif untuk memastikan program benar-benar berhasil di lapangan. Artinya, pelaksana lebih berperan sebagai pelaksana administratif, bukan sebagai pendamping yang terlibat langsung dalam keberhasilan program. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksana di sini baru sampai pada tahap menjalankan kewajiban administratif, belum sampai pada tanggung jawab sosial untuk memastikan program benar-benar berhasil. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan program ketahanan pangan di Desa Bangun belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan.

Birokrasi

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, struktur birokrasi merupakan faktor yang berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), pembagian tugas, koordinasi antar unit atau pihak yang terlibat (fragmentasi), serta sistem pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah pelaksanaan kebijakan karena setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya serta adanya prosedur kerja yang menjadi pedoman dalam menjalankan program. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, Terakhir, dari sisi birokrasi, sebenarnya program ini sudah sangat lengkap. Bapak MA menjelaskan bahwa program memiliki SOP yang mengatur mekanisme, pembagian hasil, hingga target kenaikan bobot sapi. Bapak ZF juga menyatakan bahwa sudah ada pembagian tugas antara pemerintah desa, BUMNag, dan penerima bantuan. Namun dalam praktiknya, struktur ini tidak berjalan optimal. Bapak MC mengatakan bahwa "pengecekan hanya dilakukan sekali," Bapak MRF juga menyampaikan hal yang sama, dan Bapak FSEP menyebutkan bahwa pemantauan tidak rutin. Bahkan setelah pengelolaan dialihkan ke BUMNag, pengawasan justru semakin lemah.

Jika dibandingkan dengan penelitian Hidayat (2022), disebutkan bahwa SOP yang efektif tidak hanya berhenti sebagai aturan tertulis, tetapi harus diikuti dengan monitoring rutin, evaluasi berkala, dan sistem pelaporan yang berjalan secara konsisten. Dalam penelitian tersebut, SOP benar-benar dijadikan sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan program. Artinya, setiap tahapan kegiatan diawasi, dievaluasi, dan dicatat secara sistematis sehingga pelaksana dapat mengetahui apakah program berjalan sesuai rencana atau tidak. Lebih lanjut, dalam penelitian Hidayat (2022), monitoring dilakukan secara langsung ke lapangan dengan jadwal yang jelas, sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat segera terdeteksi. Evaluasi juga tidak hanya dilakukan di akhir program, tetapi secara berkala selama program berlangsung. Selain itu, sistem pelaporan dijalankan secara disiplin sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus alat untuk melihat perkembangan program secara nyata. Dengan mekanisme ini, SOP tidak hanya menjadi pedoman, tetapi benar-benar berfungsi sebagai alat pengendali program. Sementara itu, kondisi di penelitian ini menunjukkan hal yang berbeda. Meskipun secara administratif SOP sudah ada dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program, namun dalam praktiknya SOP belum dijalankan secara maksimal. Monitoring tidak dilakukan secara rutin, evaluasi cenderung tidak terjadwal dengan baik, dan sistem pelaporan belum dimanfaatkan sebagai alat kontrol yang efektif. Akibatnya, banyak permasalahan di lapangan yang tidak terdeteksi sejak awal dan tidak segera ditindaklanjuti. SOP yang seharusnya menjadi alat untuk mengontrol jalannya program justru hanya berfungsi sebagai dokumen formal yang ada di atas kertas, tanpa implementasi yang nyata di lapangan. Selain itu, lemahnya penerapan SOP juga berdampak pada tidak adanya standar yang jelas dalam pelaksanaan program. Pelaksana menjalankan program berdasarkan kebiasaan atau kondisi yang ada, bukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini membuat pelaksanaan program menjadi tidak konsisten dan sulit untuk dievaluasi secara objektif. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan penelitian Hidayat (2022), terlihat bahwa kelemahan utama dalam penelitian ini terletak pada tidak berfungsinya SOP sebagai alat kontrol. SOP hanya menjadi dokumen administratif yang tidak dijalankan secara maksimal, sehingga tidak mampu mengarahkan, mengawasi, dan memastikan keberhasilan program secara nyata di lapangan.

Jadi kesimpulan dari ke empat indikator diatas Jika dikaitkan dengan konsep ketahanan pangan menurut FAO (*Food and Agriculture Organization*), sebenarnya ketahanan pangan itu tidak hanya sekadar menyediakan bantuan atau produksi pangan saja. FAO menjelaskan bahwa ketahanan pangan memiliki empat pilar utama, yaitu ketersediaan (*availability*), akses (*access*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*). Artinya, sebuah program dikatakan berhasil bukan hanya karena ada bantuan (misalnya sapi), tetapi harus memastikan bahwa masyarakat mampu mengakses, mengelola, dan mempertahankan keberlanjutan dari bantuan tersebut. Kalau dibandingkan dengan kondisi di Nagori Bangun, terlihat adanya ketidaksesuaian yang cukup jelas. Dari sisi ketersediaan, program memang sudah menyediakan sapi sebagai bentuk bantuan. Namun pada aspek akses, masyarakat justru mengalami kesulitan karena harus menyediakan sendiri pakan dan biaya pemeliharaan, bahkan seperti yang disampaikan Bapak Muhammad Chaidir dan Bapak Muhammad Rizky Fadillah, rumput sebagai pakan utama justru sulit didapat. Ini menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya pendukung tidak terpenuhi. Kemudian dari aspek pemanfaatan, secara teori masyarakat memang sudah memiliki pengalaman memelihara sapi, tetapi dalam praktiknya tetap menghadapi kendala seperti pakan dan penyakit, sementara seperti yang disampaikan Bapak Franky Suheri Edismon Pandiangan, laporan yang disampaikan sering tidak mendapatkan tindak lanjut. Artinya, pemanfaatan bantuan tidak didukung oleh sistem pendampingan yang memadai. Sementara itu dari aspek stabilitas, program ini juga belum menunjukkan keberlanjutan yang kuat. Hal ini terlihat dari perubahan aturan yang cukup sering, keterlambatan informasi, serta lemahnya

pengawasan setelah pengalihan ke BUMNag. Kondisi ini membuat program tidak berjalan secara konsisten dalam jangka panjang.

Jika dibandingkan dengan konsep FAO, maka program ketahanan pangan di Nagori Bangun baru memenuhi sebagian kecil dari aspek ketahanan pangan, yaitu pada ketersediaan saja. Sementara aspek akses, pemanfaatan, dan stabilitas belum terpenuhi secara optimal. Inilah yang menyebabkan program terlihat berjalan, tetapi belum mampu memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat. Dengan kata lain, secara konsep FAO, program ini masih berada pada tahap “memberi”, belum sampai pada tahap “menjamin keberhasilan dan keberlanjutan ketahanan pangan masyarakat”. Lebih jauh Program ketahanan pangan ini sebenarnya bukan program lokal, tetapi bagian dari kebijakan nasional yang dijalankan di hampir seluruh desa melalui Dana Desa. Artinya, sejak awal program ini sudah dirancang sebagai strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat secara merata. Namun di sinilah letak masalahnya. Ketika program sebesar ini yang sudah punya perencanaan, pedoman, dan anggaran yang jelas masih mengalami kendala seperti di Nagori Bangun, berarti persoalannya bukan pada konsep, tetapi pada pelaksanaannya di tingkat desa. Jika dibandingkan dengan penelitian Sari (2020) dan Putra (2021), program yang sama bisa berjalan lebih baik ketika disesuaikan dengan kondisi lokal, seperti penyediaan pakan, pendampingan intensif, dan komunikasi yang aktif. Sementara di Nagori Bangun, program dijalankan secara kaku tanpa menyesuaikan kondisi lingkungan, terutama keterbatasan rumput sebagai pakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun programnya nasional, keberhasilannya tetap bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan. Dalam hal ini, Nagori Bangun belum mampu melakukan adaptasi tersebut secara optimal. Akibatnya, program yang seharusnya menjadi solusi justru bisa menjadi beban bagi masyarakat, karena bantuan yang diberikan tidak didukung secara maksimal. Ini menegaskan bahwa pelaksanaan program masih sebatas administratif, belum benar-benar mencapai tujuan ketahanan pangan seperti yang diharapkan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Program Ketahanan Pangan

Dalam implementasi suatu kebijakan atau program pembangunan, keberhasilan pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat jalannya program tersebut. George C. Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan suatu program. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program ketahanan pangan di Desa Bangun, ditemukan beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program tersebut.

1. Faktor Pendukung Program Ketahanan Pangan

- a. Adanya Dukungan Kebijakan dan Struktur Birokrasi yang Jelas. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan memudahkan pelaksanaan program karena adanya pembagian tugas, tanggung jawab, serta prosedur kerja yang terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ketahanan pangan di Desa Bangun telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas, seperti adanya peraturan desa, SOP pelaksanaan program, serta pengelolaan program melalui BUMNag. Keberadaan aturan tersebut menunjukkan bahwa secara administratif pemerintah desa telah menyediakan kerangka kerja yang jelas dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Dengan adanya regulasi dan struktur organisasi yang mengatur pelaksanaan program, pemerintah desa memiliki pedoman dalam menjalankan program serta menentukan tanggung jawab masing-masing pihak yang

terlibat. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam implementasi program ketahanan pangan di desa tersebut.

- b. Adanya Dukungan Sumber Daya Finansial dari Dana Desa. Menurut teori George C. Edwards III, sumber daya merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya berupa sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya finansial yang mendukung pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian, program ketahanan pangan di Desa Bangun mendapatkan dukungan anggaran yang berasal dari Dana Desa yang dialokasikan untuk kegiatan ketahanan pangan. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan ternak sapi serta mendukung operasional program yang dijalankan oleh BUMNag. Ketersediaan dana ini menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program karena tanpa adanya dukungan anggaran, program tidak dapat dijalankan dengan baik. Dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah desa, program ketahanan pangan memiliki peluang untuk terus dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian pangan desa.

2. Faktor Penghambat Program Ketahanan Pangan

- a. Keterbatasan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, keterbatasan sumber daya dapat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks program ketahanan pangan berbasis peternakan sapi, ketersediaan sumber daya alam seperti pakan ternak menjadi faktor yang sangat penting. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Bangun adalah keterbatasan ketersediaan pakan ternak seperti rumput. Kondisi lingkungan yang kurang mendukung menyebabkan masyarakat harus mencari pakan ternak dari tempat lain sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat kurang berminat untuk mengikuti program peternakan sapi karena mereka harus menyediakan pakan ternak secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya alam menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan program ketahanan pangan di desa tersebut.
- b. Kurangnya Pengawasan dan Pembinaan Program. Selain faktor sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edwards III, implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila para pelaksana memiliki komitmen yang tinggi serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Bangun masih menghadapi kendala dalam hal pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat penerima bantuan. Monitoring terhadap perkembangan ternak yang dipelihara oleh masyarakat belum dilakukan secara rutin sehingga beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat tidak dapat segera ditangani. Kurangnya pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat juga menyebabkan program tidak berjalan secara maksimal. Dalam beberapa kasus, masyarakat penerima bantuan harus menghadapi kendala pemeliharaan ternak secara mandiri tanpa adanya pendampingan yang intensif dari pihak pengelola program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan program menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Bangun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi program ketahanan pangan di Desa Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yang

berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut. Kesimpulan ini disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian serta hasil analisis yang dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Implementasi program ketahanan pangan di Desa Bangun melalui kegiatan peternakan sapi telah dilaksanakan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan BUMNag dan masyarakat sebagai penerima bantuan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum program telah berjalan, namun belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya pakan ternak, serta belum maksimalnya pengawasan program.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program ketahanan pangan terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain adanya dukungan kebijakan pemerintah desa serta adanya alokasi dana desa untuk program ketahanan pangan. Sedangkan faktor penghambat antara lain keterbatasan sumber daya alam seperti ketersediaan pakan ternak (rumput), rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program, serta kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat penerima bantuan sehingga pelaksanaan program belum berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Berutu, N., & Hodriani, &. (2020). *PKM Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Produk Olahan Pisang Sale Sidodadi Ramunia*. 1(2), 83–90.
- Darmoatmodjo, Y. P., & Ferichani, M. (2024). *Penerapan Program Ketahanan Pangan di Desa Sebagai Upaya Menuju Tercapainya Desa Tanpa Kelaparan di Kabupaten Bojonegoro*. 2(1), 147–152.
- Gurning, F. L. M., & Halking. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir Secara umum pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Program Keluarga Harapan. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 5(4), 774–796.
- Gustiani, E. (2021). *Peran Sektor Peternakan Mendukung Ketahanan Pangan Di Era New Normal Di Kabupaten Majalengka*. 70–76.
- Hadiningrum, S. (2024). *Dampak Kurangnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Lokal dan Kesejahteraan Masyarakat Jurusan PPKn , Universitas Negeri Medan*. 2(5), 29–38.
- Hadiningrum, Sandika, I., Aini, S., Simbolon, Y. K., & Hadiningrum, S. (2024). *Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia Kemudian Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa . Dan pemeritahan*. 1(1).
- Halking, Agung, D., Barus, H., Sihotang, A. P., Sidabutar, E. D., Purba, N. Y., Pendidikan, J., & Sosial, F. I. (2026). *Ekologi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa : Studi tentang Pemerintah Desa dan Masyarakat di Desa Kuta Tualah , Kecamatan Namorambe , Kabupaten Deli Serdang*. November 2025.
- Ivanna, dkk. (2024). *Peran Organisasi Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan*. 4, 16354–16363.
- Ivanna, J., Ayu, C., Jona, L., Gultom, G., & Ariska, S. (2024). *Peran Pemerintah Desa Untuk Mensejahterakan Lansia Melalui Program Bina Keluarga Lansia (BKL) di Desa Tandem Hulu*. 2(1), 120–128.
- Ivanna, J., Damar, S., Yasinta, W., Kartika, I., Sitanggang, D. C., Saragih, P., Herdiansyah, H. A., & Sitorus, N. (2023). *Peran Aparat Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Pengelolaan*

- Keuangan Desa Yang Efektif Terhadap Pembangunan The Role of Village Government Officers In Making Effective Village Financial Management Towards Development.* 3740(113), 1–10.
- Ivanna, J., Margareta, A. S., Dhani, R., Sinaga, F., & Hutapea, N. M. (2024). *Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.* 2, 192–200.
- Kasmad, H. rulinawat. (2023). *studi implementasi kebijakan publik.*
- Majda El Rachman, F., Prayetno, P., Muhtaj, & Perangin-, R. B. B. (2023). *Pelatihan dan Pendampingan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.* 5, 1–9.
- Nababan, R., Tahun, M. U. N., Florenza, F., Sembiring, B., & Nababan, R. (2024). *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terhadap Bantuan Sosial Bagi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Simpang Selayang.* 4, 6779–6790.
- Ndonga, Y., Agustina, G., Nainggolan, Hodriani, Pinem, W., & Prayetno. (2025). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 8 Nomor 2, 2025 | 5735.* 8, 5735–5747.
- Oktavia, M. (2018). *Menguji Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.* 1(2), 81–92.
- Olfan, & Rijalul. (2026). *Implementasi Program Ketahanan Pangan Ternak Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis * Olfan Rendi 1, Rijalul Fikri 2* 1. 13–19.
- Prayetno, E. P. P. (2024). *Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Untuk Kemandirian Perempuan Di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan.* 09.
- Prayetno, & Fazli Rachman^{1*}, Majda El Muhtaj², M. Fahmi Siregar³, R. B. B. P. (2022). *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950 Volume 09 Nomor 04, Desember 2024 Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Untuk Kemandirian Perempuan Di Desa Cinta Rakyat Ke.* 223–232.
- Rachman, F., Alhudawi, U., & Simatupang, E. (2021). *Membangun Kesadaran Bela Negara Masyarakat.* 5(2), 529–538.
- Rachman, F., Yunita, S., Manik, M. M., Bilanta, O., Safitri, E., Sabri, T. M., Halizah, N., & Yasmin, P. (2023). *Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tanjung Rejo.* 20, 40–52. <https://doi.org/10.24114/jk.v20i1.43782>
- Rahman, F. (2022). *BUM desa sebagai kekuatan ekonomi baru : sebuah gagasan untuk desa di Indonesia.* February.
- Rahmi, H., & Jumiaty, J. (2020). *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pesisir Selatan.* *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP),* 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.102>
- Ramsul Nababan, Jufri Darma, K. S. & A. N. (2020). *Pelita masyarakat.* 1(2), 76–82.
- Siahaan & Pinem. (2024). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meminimalisir Kemiskinan Di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.* 09.
- Wahyudi, Dkk. (2022). *Rambu-Rambu Menulis Ilmiah Rambu-Rambu Menulis Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.*
- Yunita, S., Sarina, E., Pendidikan, J., & Sosial, F. I. (2017). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan.* 9(1), 57–71.